

LAPORAN KINERJA



PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



TAHUN 2019



**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN CILACAP
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kata Pengantar

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2019 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tahun 2019 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target dan tidak ada sasaran kinerja yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap (UPT Stasiun PSDKP Cilacap).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Cilacap dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Cilacap, 23 Januari 2020

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Cilacap



Moh. Nuh Hudawi, S.Pi
NIP. 19791219 200912 1 001

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan Lkj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan UPT Stasiun PSDKP Cilacap, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Cilacap menggunakan 3 (tiga) perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Stasiun PSDKP Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sebagai implikasi penerapan BSC dalam upaya perencanaan Tahun 2019, Sasaran Strategis UPT Stasiun PSDKP Cilacap bermuara pada 7 Sasaran Strategis (SS), yaitu: ⁽¹⁾Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; ⁽²⁾Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem Komunikasi pengawasan SDKP; ⁽³⁾Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif; ⁽⁴⁾Tersedianya Aparatur Sipil Negara Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang kompeten, Profesional, dan berintegritas; ⁽⁵⁾ Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses ⁽⁶⁾Terwujudnya birokrasi Stasiun PSDKP Cilacap yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan ⁽⁷⁾Terkelolanya anggaran Stasiun PSDKP Cilacap secara efisien dan akuntabel.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2019, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 16 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja

UPT Stasiun PSDKP Cilacap. Pencapaian IKU pada Tahun 2019 dari 16 (enam belas) IKU level UPT Stasiun PSDKP Cilacap seluruh IKU tersebut berstatus berwarna hijau (terrealisasi 100%).

Realisasi anggaran tahun 2019 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap sampai 31 Desember 2019 sebesar **98,63** % atau sebesar Rp **24,386,811,244,-** (*Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp. **24.726.431.000,-** (*Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*). Melalui Laporan Kinerja Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2019.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Data Umum Organisasi	2
D. Isu Aktual	5
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	6
BAB II.....	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015 - 2019	7
B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap Tahun 2019	10
C. Rencana Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap Tahun 2019	11
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	12
E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	15
BAB III.....	16
Akuntabilitas Kinerja	16
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2019.....	16
1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019	16
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	18
1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.....	18
2. Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Infrastruktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dan Sistem Informasi Dan Komunikasi Pengawasan SDKP.....	28
3. Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP Secara Profesional dan Partisipatif.....	28

4.	Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Aparatur Sipil Negara UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang kompeten, Profesional, dan berkepribadian.....	35
5.	Sasaran Strategis 5 : Tersedianya manajemen pengetahuan UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang handal dan mudah diakses.....	37
6.	Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya birokrasi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.....	38
7.	Sasaran Strategis 7 : Terkelolanya anggaran Stasiun PSDKP Cilacap secara efisien dan akuntabel.....	41
C.	Akuntabilitas Keuangan	43
BAB IV.....		44
PENUTUP.....		44
A.	Kesimpulan	44
B.	Saran.....	44
LAMPIRAN		45
1.	Lampiran Perjanjian Kinerja	45
2.	Renstra Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap	49

Daftar Tabel

Tabel 1. Perubahan Indikator Kinerja Utama 2019.....	13
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019.....	14
Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019.....	16
Tabel 4. Capaian Indikator Utama (IKU) pada Sasaran Strategis 1 (Satu)	19
Tabel 5. Capaian kegiatan Jumlah Unit Usaha Perikanan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku	20
Tabel 6. Hasil pengukuran 4 Sub Sub-IKU “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku”	20
Tabel 7. Ketaatan kapal perikanan yang diperiksa lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019.....	22
Tabel 8. Hasil Pengawasan UPI di Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019	23
Tabel 9. Jumlah UPI yang diperiksa di wilayah Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada Tahun 2019.....	24
Tabel 10. Capaian kegiatan distribusi ikan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019.24	
Tabel 11. Capaian kegiatan pengawasan unit usaha budidaya di Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap bulan Januari – Desember Tahun 2019	25
Tabel 12. Capaian kegiatan Pelaku Usaha pemanfaatan WP3K yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan	26
Tabel 13. Sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja Pemanfaatan WP3K.....	26
Tabel 14. Capaian IKU pada SS-2 “Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP”	28
Tabel 15. Capaian IKU pada SS-3 “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif”	29
Tabel 16. Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019	29
Tabel 17. Jumlah hari operasi Speedboat Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019	31
Tabel 18. Jenis ikan yang dilindungi dan diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.....	34
Tabel 19. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap Tahun 2019.....	35
Tabel 20. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap	36
Tabel 21. Penerapan Manajemen Pengetahuan Stasiun PSDKP Cilacap menggunakan Aplikasi Bitrix.24	37
Tabel 22. Pencapaian keempat IKU yang ada dalam SS-6.....	38
Tabel 23. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap	42
Tabel 24. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap periode Januari – Desember 2019.....	43

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap.....	4
Gambar 2. Peta Strategi Direktorat Jenderal PSDKP.....	9
Gambar 3. Peta Sasaran Strategis Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019.....	13
Gambar 4. Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas Hiu Macan 05 dan Hasil pemeriksaa kapal perikanan.....	30
Gambar 5. Capaian IKU Presentase Unit Kerja yang menerapkan Sisem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.....	38
Gambar 6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap	40
Gambar 7. Pemenuhan Dokumen AKIP	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap tahun 2019 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan - kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawas SDKP Cilacap untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 57/KEP.DJ-PSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, yang diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 9/PER.DJPSKDP/2017. Selain itu, Renstra Ditjen. PSDKP juga telah dilakukan reviu pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang mengacu pada hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran

dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Cilacap menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi,serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;

- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/ Permen-KP/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Kepala Subseksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Jabatan Fungsional dan Satuan Pengawasan dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

a) Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Urusan Tata Usaha:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Kepala Subseksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran:

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d) Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana Pengawasan:

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana

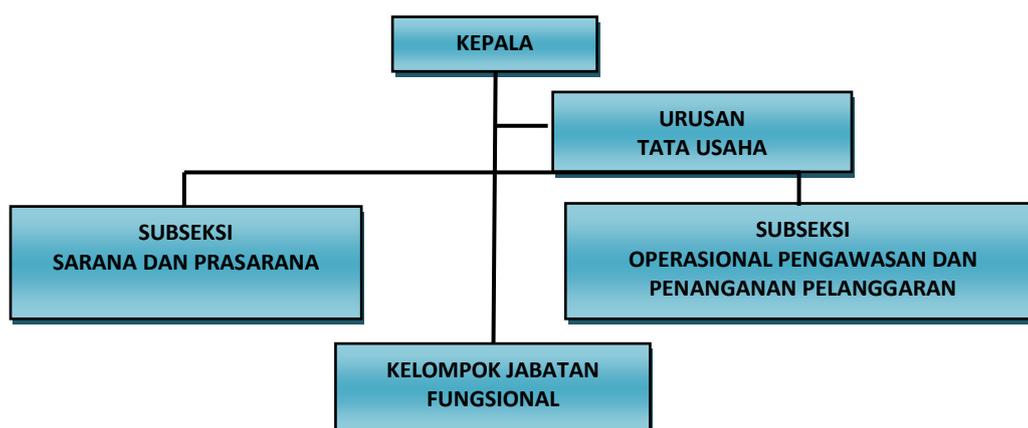
dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas.

e) Kelompok Jabatan Fungsional:

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

f) Satuan Pengawasan SDKP:

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan diwilayah kerja masing - masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap meliputi 4 (Empat) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 15 (Lima Belas) Wilayah Kerja (Wilker) sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Maraknya kegiatan penangkapan benih lobster yang di lakukan oleh nelayan kecil berlokasi di sepanjang pantai selatan jawa;
2. Penggunaan alat tangkap cantrang masih dilakukan oleh nelayan pantura pada umumnya, di karenakan adanya kebijakan dari pemerintah yang memperbolehkan alat tangkap tersebut di operasikan;
3. Maraknya kegiatan *Destruktif Fishing* yang di lakukan di perairan umum, yang berakibat pada terganggunya kelestasian Sumber Daya Perikanan;
4. Masih banyaknya usaha budidaya ikan yang membahayakan dan merugikan atau dilarang untuk diperdagangkan (ikan *invasive*) di sentra usaha budidaya ikan hias, lestroran ataupun rumah makan;
5. Banyak kapal perikanan ukuran kecil (< 30 GT) yang melakukan andon mengejar musim ikan (WPP-NRI 573) tanpa dilengkapi dengan SIPI atau Surat Tanda Pendaftaran kapal Andon;
6. Masih ditemukan kapal perikanan ukuran < 30 GT yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan SLO dan SPB, diguga kapal-kapal tersebut izin SIPInya sudah tidak berlaku dan alat penangkap ikan tidak sesuai SIPI, terjadi di WPP-NRI 573 dan 712;
7. Masih ditemukan kapal kapal perikanan ukuran > 30 GT yang terpantau / terdapat indikasi pelanggaran menangkap ikan di luar daerah penangkapan ikan (WPP NRI 573 kelaut lepas, dan WPP 712 ke perairan selat maksar);
8. Pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan di pantura (oleh industry batik dan unit pengolahan ikan).

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perjanjian Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2019; ⁽²⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019.

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2015-2019. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 57/KEP.DJ-PSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, yang diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 9/PER.DJPSKDP/2017. Selain itu, Renstra Ditjen. PSDKP juga telah dilakukan revaluasi pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang mengacu pada hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen

PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran pemanfaatan SDKP Melalui Pengawasan Partisipatif;
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran Kelautan dan Perikanan

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen. PSDKP. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen. PSDKP adalah “ Meningkatkan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”.

3. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2015-2019 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas dan Kementerian Keuangan serta menggunakan

pendekatan *Balanced Scorecard (BSC)* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dan pengukuran kinerja.

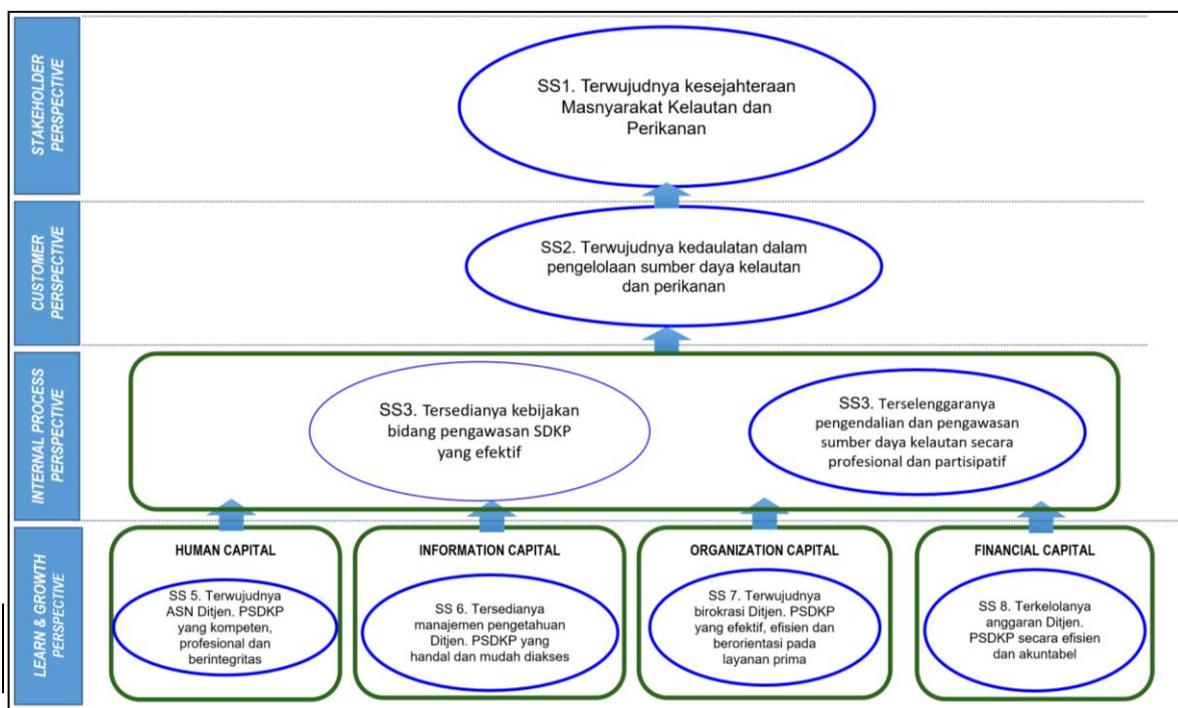
Pada pendekatan *logical model*, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (*impact*), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (*Outcome*), dan sasaran kegiatan (unit eselon II) yang menghasilkan keluaran (*output*).

Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2015-2019 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

Disisi lain, pendekatan BSC adalah suatu konsep manajemen dalam pengukuran kinerja secara terukur (kuantitatif), utuh dan seimbang pada berbagai perspektif, jangka waktu, dan ruang lingkup. Sasaran pada pendekatan ini dijabarkan kedalam 4 perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *internal process perspective* dan *learn and grow perspective*, sebagai berikut:

Sasaran Strategis hasil implementasi BSC tahun 2019 dipetakan dalam Peta Strategi sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Strategi Direktorat Jenderal PSDKP

a. Stakeholder/Customer Perspective:

- 1) Sasaran strategis (SS): Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

b. Customer Perspective:

- 2) Sasaran Strategis (SS); Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

c. Internal Process Perspective:

- 3) Sasaran Strategis (SS) : Tersedianya Kebijakan bidang Pengawasan SDKP yang efektif.
- 4) Sasaran Strategis (SS) : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif.

d. Learning and Growth Perspective:

- 5) Sasaran Strategis (SS) : Terwujudnya ASN Lingkup Ditjen PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas.
- 6) Sasaran Strategis (SS) : Tersedianya manajemen Pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang Handal dan Mudah di Akses.
- 7) Sasaran Strategis (SS) : Terwujudnya Birokrasi DJ-PSDKP yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.
- 8) Sasaran Strategis (SS) : Terkelolanya Anggaran Ditjen PSDKP Secara Efisien dan Akuntabel

B. Rencana Strategis Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap Tahun 2019

Rencana Strategis (Renstra) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap 2019 menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan yaitu memadu serasikan kebijakan pusat dan UPT Stasiun PSDKP Cilacap adalah pemfokusan kegiatan pengawasan kepada perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP.

Adapun visi dan misi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap.

Sasaran : Indonesia bebas *illegal fishing* serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

C. Rencana Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap Tahun 2019

1. Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap 2015-2019 yaitu: PROGRAM PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat Stasiun PSDKP Cilacap, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada;
 - a. Operasional Kapal Pengawas;
 - b. Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi;
 - c. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi;
 - d. Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi;
 - e. Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat;
 - f. Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun.
- Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - a. Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel;
 - b. Barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel.
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
 - a. Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangannya.
- Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
 - a. Kapal Perikanan yang Laik Operasional;
 - b. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Unit Usaha Budidaya Ikan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan;

- d. Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 - a. Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
 - b. Layanan Dukungan Manajemen Satker;
 - c. Layanan Perkantoran.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

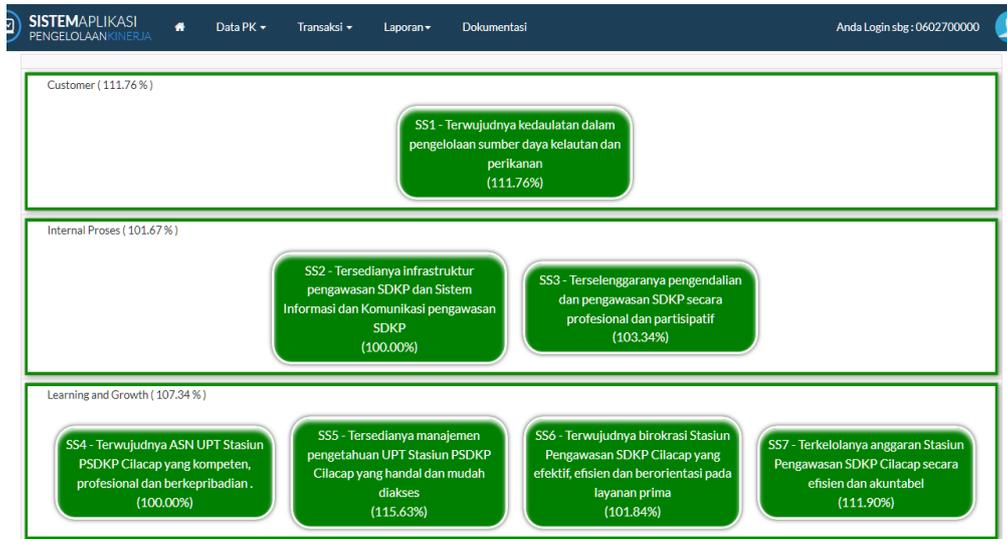
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Cilacap, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Cilacap menggunakan 3 (tiga) perspektif yaitu *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective* dikarenakan Stasiun PSDKP Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sasaran Strategis hasil implementasi BSC Tahun 2019 dipetakan dalam Peta Sasaran Strategis pada gambar 3 berikut:



Gambar 3. Peta Sasaran Strategis Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019

Customers Perspective berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*. Sedangkan *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Pada tahun 2019 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap terdapat beberapa perubahan IKU yang di dasarkan pada surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 16644/ PSDKP.0.1.1/ RC.610/ VI/ 2019 hal Penyesuaian Dokumen Kontrak kinerja. Berdasarkan hal tersebut jumlah IKU Stasiun PSDKP Cilacap dari 17 (Tujuh Belas) menjadi 16 (Enam Belas) IKU. Indikator yang mengalami perubahan sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan Indikator Kinerja Utama 2019

KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA (SEMULA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (MENJADI)
IKU.5	Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Cilacap (hari); 133 Hari Operasi	Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Cilacap (hari); 22 Hari Operasi
IKU.6	Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi (orang)	-

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>			
1.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	1. Jumlah unit usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan (Unit Usaha)	2.784
		2. Jumlah pelaku usaha pemanfaatan WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai ketentuan perundang-undangan (Pelaku Usaha)	19
<i>INTERNAL PROSES PERSPECTIVE</i>			
2.	Tersedianya infrastruktur pengawasan SDKP dan Sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP	3. Jumlah Infrastruktur pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu [Unit] <i>a. Bangunan Operator</i>	1
3.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif	4. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap (hari)	90
		5. Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Cilacap (hari)	22
		6. Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap	2
		7. Jumlah Barang Bukti dan Awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap	2
		8. Jenis Ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	3
<i>LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE</i>			
4.	Terwujudnya ASN UPT Stasiun PSDKP Cilacap yang kompeten, professional dan berkepribadian	9. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap	71
5.	Tersedianya manajemen pengetahuan UPT Stasiun PSDKP Cilacap yang handal dan mudah diakses	10. Persentase yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup unit kerja Stasiun PSDKP Cilacap (%)	80
6.	Terwujudnya birokrasi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	11. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (%)	100
		12. Level Maturitas SPIP Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (nilai)	Level 3
		13. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun Pengawasan sdkp Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		telah dilengkapi dan disampaikan (%)	
		14. Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100
7.	Terkelolanya anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap secara efisien dan akuntabel	15. Nilai kinerja anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (nilai)	Baik [87]
		16. Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap TA. 2018 (%)	1

E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja tahun 2019 didukung dengan implementasi Aplikasi BSC "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2019

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2019 Stasiun PSDKP Cilacap telah menyempurnakan dan menetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 16 (Enam belas) IKU. Capaian kinerja Tahun 2019 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2019	% CAPAIAN	STATUS
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>						
1.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	1. Jumlah unit usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan (Unit Usaha)	2.784	2.939	105,56 %	
		2. Jumlah pelaku usaha pemanfaatan WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai ketentuan perundang-undangan (Pelaku Usaha)	19	24	120,00 %	
<i>INTERNAL PROSES PERSPECTIVE</i>						
2.	Tersedianya infrastruktur pengawasan SDKP dan Sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP	3. Jumlah Infrastruktur pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu [Unit] - <i>Bangunan Operator</i>	1	1	100.00%	
3.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan	4. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap (hari)	90	90	100,00 %	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2019	% CAPAIAN	STATUS
	SDKP secara profesional dan partisipatif	5. Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Cilacap	22	22	100,00 %	
		6. Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap	2	2	100,00 %	
		7. Jumlah Barang Bukti dan Awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap	2	2	100,00 %	
		8. Jenis Ikan yang dilindungi dan diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	3	5	120,00 %	
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE						
4.	Terwujudnya ASN UPT Stasiun PSDKP Cilacap yang kompeten, professional dan berkepribadian	9. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap	71	71	100,00 %	
5.	Tersedianya manajemen pengetahuan UPT Stasiun PSDKP Cilacap yang handal dan mudah diakses	10. Persentase yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup unit kerja Stasiun PSDKP Cilacap (%)	80	92,50	115,62 %	
6.	Terwujudnya birokrasi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	11. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (%)	100	100	100%	
		12. Nilai Maturitas SPIP Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (nilai)	Level 3	Level (3,50)	120,00 %	
		13. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang	100	100	100%	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TAHUN 2019	% CAPAIAN	STATUS
		dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)				
		14. Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100	100	100%	
7.	Terkelolanya anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap secara efisien dan akuntabel	15. Nilai kinerja anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (nilai)	Baik [87]	93,41	107,36 %	
		16. Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap TA. 2018 (%)	1	0,01	120,00%	

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor >=100)
2		Hati-hati (80 <=Skor<100)
3		Buruk (Skor < 80)
4		Belum Ada Skor

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Sampai dengan periode Tahun 2019 Stasiun PSDKP Cilacap telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

Pencapaian Sasaran Strategis "Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan" diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU,

yaitu: **(1) "Jumlah unit usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan"**, Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari agregasi 4 Sub IKU Pengawasan SDKP yaitu: ⁽¹⁾Jumlah kapal perikanan yang Laik Operasional; ⁽²⁾ Jumlah unit usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan; ⁽³⁾Jumlah Unit Usaha Budidaya Ikan yang taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan; ⁽⁴⁾Jumlah Usaha distribusi hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. **(2) "Jumlah pelaku usaha pengelolaan WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai ketentuan perundang-undangan "** Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari agregasi 2 Sub IKU Pengawasan SDKP yaitu: ⁽¹⁾Jumlah pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; ⁽²⁾ Jumlah pelaku usaha pemanfaatan Ruang Laut Nasional yang taat terhadap peraturan Perundang-Undangan. Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari Jumlah unit usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan dan Jumlah pelaku usaha pengelolaan WP3K yang yang diperiksa kepatuhannya sesuai ketentuan perundang-undangan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Untuk mencapai sasaran strategis ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 854.760.000 (*Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dan sampai dengan 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp. 842.468.000 (*Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) atau 98,56%. Capaian IKU pada SS-1 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Indikator Utama (IKU) pada Sasaran Strategis 1 (Satu)

KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	%
IKU.1	Jumlah Unit Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan (Unit Usaha)	2.784 Unit Usaha	2.939 Unit Usaha	105,56%
IKU.2	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai ketentuan perundang-undangan (Pelaku Usaha)	19 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	126,32%

Penjelasan masing – masing capaian IKU pada Sasaran Strategis 1 (satu) sebagai berikut :

(1) Jumlah unit usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan

Capaian IKU "Jumlah Unit Usaha Perikanan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku" pada Tahun 2019 telah tercapai sebesar 2.939 Unit. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2018 yaitu 2.838 unit usaha yang diperiksa ketaatannya. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya jumlah pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian kegiatan IKU "Jumlah Unit Usaha Perikanan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku" tercantum dalam tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5. Capaian kegiatan Jumlah Unit Usaha Perikanan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019		% CAPAIAN
		TARGET	CAPAIAN	
Jumlah Unit Usaha Perikanan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2.838 Unit	2.784 Unit	2.939 Unit	105,56%

Pencapaian kinerja IKU-1 diperoleh dari agresi 4 sub kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yang tercantum dalam dokumen RKAK – K/L Tahun 2019 yaitu : ¹⁾ Jumlah Kapal Perikanan yang laik operasional; ²⁾ Jumlah Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang - undangan; ³⁾ Jumlah Unit usaha Budidaya Ikan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan; dan ⁴⁾ Jumlah Usaha Distribusi ikan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pengukuran 4 sub kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana tercantum pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil pengukuran 4 Sub Sub-IKU "Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangn yang Berlaku"

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
1	Jumlah kapal perikanan yang Laik Operasional	2.633 kapal	2.777 kapal	105,46 %
2	Jumlah unit usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangn	75 unit	85 unit	113,33 %
3	Unit Usaha Budidaya Ikan yang diperiksa kepatuhannya	44 unit	44 unit	100,00 %

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
	Terhadap Peraturan Perundang-Undangan			
4	Unit Usaha distribusi hasil perikanan yang tdiperiksa Kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan	32 unit	33 unit	103,12 %

Secara umum, tingginya pencapaian kinerja tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2019, hal sebagai berikut:

- Kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasi antara UPT dengan Satuan Pengawas dan Wilayah Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap;
- Kegiatan pertemuan dengan pelaku usaha dibidang perikanan;
- Semakin meningkatnya peran POKMASWAS dalam membantu pengawasan.

Untuk Pembahasan capaian kinerja masing-masing sub IKU-1 yang berkontribusi pada pencapaian kinerja "Jumlah Unit Usaha Perikanan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku", sebagai berikut:

a. Ketaatan Kapal Perikanan yang laik operasi

Pada Tahun 2019, capaian Sub-IKU "jumlah unit usaha Penangkapan Ikan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan " telah tercapai sebesar 2.777 Unit dari target sebesar 2.633 dengan persentase capaian 105,46 %. Dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah kapal yang diperiksa mengalami peningkatan, pada tahun 2018 kapal yang diperiksa terealisasi sebanyak 2.696 unit

Nilai capaian Sub-IKU tersebut diperoleh dari jumlah kapal yang diperiksa kepatuhannya yang laik operasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dan kapal perikanan yang diterbitkan SKM (Surat Keterangan Melaut). Kapal yang diperiksa kepatuhannya yang sesuai dengan IKU "Jumlah unit Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap Peraturan Perundangan-Undangan" tercantum dalam Tabel 7.

Tabel 7. Ketaatan kapal perikanan yang diperiksa lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019

No	UPT/Satwas/Wilker PSDKP	Jumlah Kapal Laik Operasi
1	STASIUN PSDKP CILACAP	261
2	WILKER PSDKP SADENG	20
3	SATWAS SDKP PEKALONGAN	217
4	WILKER PSDKP BATANG	216
5	WILKER PSDKP TEGAL	123
6	WILKER PSDKP BREBES	103
7	WIKER PSDKP WONOKERTO	2
8	WILKER PSDKP KENDAL	0
9	WILKER PSDKP PEMALANG	0
10	SATWAS SDKP PATI	620
11	WILKER PSDKP KARIMUN JAWA	0
12	WILKER PSDKP SARANG	134
13	WILKER PSDKP TASIK AGUNG	409
14	WILKER PSDKP KARANGANYAR	240
15	WILKER PSDKP JOBOKUTO-JEPARA	109
16	WILKER PSDKP MORODEMAK	45
17	WILKER PSDKP BINANGUN	145
18	SATWAS SDKP TRENGGALEK	98
19	WILKER PSDKP TULUNG AGUNG	0
20	SATWAS SDKP MALANG	35
Jumlah		2.777

Sumber: Kepala Subseksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Stasiun PSDKP Cilacap

Pencapaian ini diupayakan melalui kegiatan: Monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap, yang menangkap ikan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap. Berdasarkan hasil analisis selama bulan Januari sampai dengan Desember 2019, hal-hal yang menyebabkan kapal tidak laik operasi, antara lain:

- Kapal baru selesai dan akan melakukan docking;
- Kapal tidak melakukan kegiatan perikanan dan kembali ke pelabuhan asal;
- Tidak ditemukan alat tangkap perikanan diatas kapal;
- Kapal menunggu proses perpanjangan SIPI atau akan melakukan verifikasi pengukuran ulang kapal.

- b. *Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.*

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha yang mengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB).

Pada tahun 2019 pencapain Sub-IKU Jumlah Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang-undangan tercapai sebanyak 85 UPI yang tercantum dalam tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Pengawasan UPI di Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019

SUB IKU	CAPAIAN 2018	TARGET 2019	CAPAIAN	
			UPI Sekala Besar	UPI Sekala Kecil
Jumlah Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang taat terhadap peraturan perundang - undangan	70 Unit Usaha	75 Unit Usaha	27 Unit USaha	58 Unit Usaha
Jumlah UPI yang taat	70 Unit Usaha	75 Unit Usaha	85 Unit USaha	
CAPAIAN	107,47 %	113,33 %		

Periode Tahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 85 UPI yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas pemeriksaan UPI sekala Besar sebanyak 27 unit usaha dan UPI sekala Kecil sebanyak 58 unit usaha. Dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah UPI yang diperiksa mengalami peningkatan sebanyak 10 unit usaha pada tahun 2019 . Berikut merupakan total unit usaha UPI yang diawasi di wilayah Pengawasan UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang aktif selama tahun 2019 seperti yang tercantum dalam Tabel 9:

Tabel 9. Jumlah UPI yang diperiksa di wilayah Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada Tahun 2019

No	Stasiun/Satwas/Wilker	Jumlah UPI yang diperiksa	
		Skala Kecil	Skala Besar
1	Stasiun PSDKP Cilacap	10 Unit	3 Unit
2	Satwas SDKP Pekalongan	8 Unit	9 Unit
3	Satwas SDKP Pati	12 Unit	12 Unit
4	Satwas SDKP Trenggalek	15 Unit	3 Unit
5	Satwas SDKP Malang	13 Unit	-
Jumlah Total UPI (Unit)		58 Unit	27 Unit
Jumlah UPI yang Taat (Unit)		58 Unit	27 Unit

c. *Usaha Distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan.*

Pada periode Tahun 2019 tercapai 33 unit usaha distribusi diperiksa kepatuhannya dari target Tahun 2019 sebesar 32 Unit usaha dengan presentase capaian 103,12 %. Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pengawasan distribusi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, lingkup wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap seperti yang tercantum dalam tabel 10.

Tabel 10. Capaian kegiatan distribusi ikan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019

SUB IKU	REALISASI 2018	TAHUN 2019		% CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	
Unit Usaha distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan	20 Unit Usaha	32 Unit USaha	33 Unit Usaha	103,12%

Periode Tahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 33 unit usaha distribusi yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara pada tahun 2018 pelaku distribusi yang di periksa sebanyak 20 unit usaha. Dibandingkan dengan tahun 2018 jumlah unit usaha distribusi yang diperiksa mengalami peningkatan sebanyak 13 unit usaha pada tahun 2019 .

d. Unit usaha budidaya perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Periode tahun 2019 telah tercapai 44 unit usaha yang diperiksa dari target yang ditetapkan yaitu 44 unit usaha, dibandingkan dengan Tahun 2018 mengalami penurunan target yang di tetapkan yaitu 52 unit usaha pada tahun 2018. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pengawasan terhadap usaha budidaya ikan meliputi dokumen perizinan, obat dan pakan ikan yang digunakan. Pada Tahun 2019, dilakukan pengawasan terhadap 44 unit usaha budidaya yang terdiri atas pemeriksaan Budidaya air tawar sebanyak 22 unit usaha dan pemeriksaan budidaya air payau sebanyak 22 usaha budidaya, seperti yang tercantum dalam Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Capaian kegiatan pengawasan unit usaha budidaya di Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap bulan Januari – Desember Tahun 2019

No	Unit Pelaksana Teknis	Jenis Budidaya	
		Perairan Umum/ Tawar	Laut/ Air Payau
1	Stasiun PSDKP Cilacap	3 Unit	1 Unit
2	Satwas SDKP Pekalongan	2 Unit	10 Unit
3	Satwas SDKP Pati	3 Unit	11 Unit
4	Satwas SDKP Trenggalek	12 Unit	0 Unit
5	Satwas SDKP Malang	2 Unit	0 Unit
Jumlah		22 Unit	22 Unit
Unit Pembudidaya Ikan yang Diperiksa		44 Unit	
Target Tahun 2019		44 Unit	

(2) Jumlah pelaku usaha pemanfaatan WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai ketentuan perundang-undangan

Periode tahun 2019 telah tercapai 24 unit usaha dari target Tahun 2019 yang telah di tetapkan yaitu 19 unit usaha dengan realisasi 120,00 %. Capaian IKU merupakan akumulasi dari capaian 2 (dua) sub IKU dengan kegiatan utama yang mendukung pencapaiannya, antara lain: ⁽¹⁾Pelaku usaha pengelolaan Jasa Kelautan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan; ⁽²⁾Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut nasional yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian kegiatan jumlah pelaku usaha pemanfaatan WP3K terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12. Capaian kegiatan Pelaku Usaha pemanfaatan WP3K yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan

No	IKU	CAPAIAN 2018	TARGET 2019	REALISASI I	% Capaian
1	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai ketentuan perundang-undangan (Pelaku Usaha)	6 Pelaku Usaha	19 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	120,00 %

Periode Tahun 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 24 Pelaku Usaha WP3K yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan sementara pada tahun 2018 jumlah pelaku usaha WP3K yang diperiksa sebanyak 6 pelaku usaha. Bila dibandingkan hasil capaian pelaku usaha pemanfaatan WP3K antara tahun 2018 dan 2019, maka capaian pada tahun 2019 mengalami Peningkatan sebanyak 18 pelaku usaha .

Hasil pengukuran 2 Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana pada tabel 13 berikut:

Tabel 13. Sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja Pemanfaatan WP3K

No	Sub IKU	Target 2019	Realisasi Tahun 2019	% Capaian
1	Pelaku usaha pengelolaan Jasa Kelautan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	100,00 %
2	Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut nasional yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.	17 Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha	120,00 %

Sesuai dengan Tabel 13 diatas, keberhasilan capaian tersebut didukung oleh tersedianya petunjuk teknis pengawasan perikanan yang memadai, yaitu:

- Keputusan Dirjen PSDKP KEP-57/ DJ-PSDKP/2011 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.
- Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan Akibat Kegiatan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kegiatan utama yang dilaksanakan Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian Indikator kinerja ini sebagai berikut:

1. Pelaku usaha pengelolaan Jasa Kelautan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yaitu sebanyak 2 Pelaku Usaha:
 - ✓ PT. Jogja Magasa Iron
 - ✓ PT. Putra Garuda Mas Raya
2. Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut nasional yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yaitu 17 Pelaku Usaha dan tercapai 22 Pelaku Usaha. Terjadi kenaikan 20% atas target capaian tersebut. Adapun pelaku usaha tersebut adalah:
 - ✓ PT. Juifa International Foods
 - ✓ UD. Mutiara Gading
 - ✓ PT. Jala Sembilan
 - ✓ PT. Indomina Cipta Agung
 - ✓ PT. Nihon Novelica Food
 - ✓ PT. Cahaya Segar Perkasa
 - ✓ UD. Samudera Jaya
 - ✓ CV. Karagen Indonesia
 - ✓ UD. Lautan Jaya
 - ✓ PT. Bahari Mina Nusatama
 - ✓ PT. Indosigma Surya Cipta
 - ✓ PT. Aquafarm Nusantara
 - ✓ PT. Bandeng Juwana
 - ✓ PT. CASSANATAMA NATURINDO
 - ✓ CV. Mina Kencana Mulya
 - ✓ PT. Fu Shen Sea Food Indonesia
 - ✓ CV. Sinar Mutiara Abadi
 - ✓ PT. Blue Sea Industry
 - ✓ PT. CNL Maju Bersatu
 - ✓ PT. Maya Food Industries
 - ✓ PT. Minamarin Bahari Kencanas
 - ✓ PT. Indonusa Algaemas Prima

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian IKU Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai ketentuan perundang-undangan (Pelaku Usaha) sampai dengan bulan Desember 2019 adalah Rp. 134.151.400,- (*Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu*

Empat Ratus Rupiah) dengan persentase (99,37%) dari anggaran yang dialokasikan Rp.135.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

2. Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Infrastruktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dan Sistem Informasi Dan Komunikasi Pengawasan SDKP

Dalam rangka pencapaian SS-2 "Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP", Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi 1 IKU, yaitu ⁽¹⁾Jumlah infrastruktur pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu [Unit], sebagaimana pada Tabel 14.

Tabel 14. Capaian IKU pada SS-2 "Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP"

Kode	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
IKU.3	Jumlah Infrastruktur pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu (Unit) a. Bangunan Operator	1 bangunan	1 bangunan	100.00%

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis (SS2) adalah Jumlah Pemenuhan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang memadai secara Akuntabel dan tepat waktu di Stasiun PSDKP Cilacap yang di targetkan adalah pembangunan Operator Satwas SDKP Pati. Pemenuhan infrastruktur pengawasan yaitu sebesar 1 (satu) unit bangunan sampai dengan Tahun 2019 telah selesai, dengan capaian sebesar 100,00 %. Adapun dukungan Anggaran yang terealisasi sampai bulan Desember 2019 adalah Rp. 374.043.100 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*) (99,74%) dari anggaran yang dialokasikan Rp.375.000.000 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

3. Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP Secara Profesional dan Partisipatif

Dalam rangka pencapaian SS-3 "Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif", Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi 5 (lima) IKU, yaitu ⁽¹⁾Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap (hari); ⁽²⁾Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Cilacap; ⁽³⁾Jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap ⁽⁴⁾Jumlah barang bukti dan awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap; ⁽⁵⁾Jenis ikan yang

dilindungi dan diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung capaian sasaran strategis (SS) "Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP Secara Profesional dan Partisipatif" dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.495.992.000 (*Sembilan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) sampai dengan 31 Desember telah terealisasi Rp.9.406.506.884 (*Sembilan Milyar Empat Ratus Enam Juta Lima Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) atau sebesar 99,06%.

Tabel 15. Capaian IKU pada SS-3 "Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP secara Profesional dan Partisipatif"

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap (hari)	90 Hari Operasi	90 Hari Operasi	100,00 %
Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Cilacap	22 Hari Operasi	22 Hari Operasi	100,00 %
Jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap	2 Kasus	2 Kasus	100,00%
Jumlah barang bukti dan awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap	2 Kasus	2 Kasus	100,00%
Jenis ikan yang dilindungi dan diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	3 Jenis Ikan	3 Jenis Ikan	100,00%

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SS-3 sebagai berikut:

- a. Kegiatan operasional pengawasan kegiatan *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP-NRI Wilayah Barat didukung oleh 1 (Satu) unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu Macan 05 dan 5 (lima) unit speedboat PSDKP. Capaian IKU Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap pada Tahun 2019 telah tercapai 90 hari Operasi, dari target yang telah di tetapkan pada Tahun 2019 yaitu 90 Hari Oprasi di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Adapun rincian capaian hari operasi pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018		TARGET 2019	REALISASI 2019	Capaian
	TARGET	REALISASI			
Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap (hari)	150 Hari Operasi	126 Hari Operasi	90 Hari Operasi	90 Hari Operasi	100,00 %
TOTAL	150 Hari	126 Hari	90 Hari	90 Hari	100,00 %

Periode Tahun 2019 telah terlaksana hari Operasi Kapal Pengawas Hiu Macan 05 Sebanyak 90 hari Operasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 90 Hari Operasi tercapai 100,00%. Sementara pada tahun 2018 Capaian hari operasi Kapal Pengawas Hiu Macan 05 tercapai sebanyak 126 Hari Operasi dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 150 Hari Operasi atau sebesar 84,00%. Dari perbandingan capaian Hari Operasi antara tahun 2018 dan tahun 2019, maka pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 16,00%. Berikut disampaikan capaian hasil hari Operasi kapal Pada Tahun 2019 seperti gambar 4 berikut:

JUMLAH DAN REKAPITULASI KAPAL YANG DIPERIKSA
KP. HIU MACAN 05 TAHUN 2019

No	Bulan	Jumlah Hari Operasi	Jumlah Jam Layar	Riksa			Adhock / Kawal			Jumlah Total	Keterangan
				KII	KIA	JML	KII	KIA	JML		
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	10	79	7	-	7	2	-	2	9	Di adhock ke pelabuhan umum Tegal
3	Maret	15	147	31	-	31	-	-	-	31	-
4	April	8	75	12	-	12	2	-	2	14	1 di adhock ke pelabuhan umum Jepara dan 1 di adhock ke pelabuhan umum Tegal
5	April	5	49	4	-	4	-	-	-	4	-
6	April	5	37,5	8	-	8	1	-	1	9	di adhock ke pelabuhan umum Jepara
7	Mei	2	26	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Mei	7	65,5	7	-	7	5	-	5	12	1 di adhock ke serang, 4 dikawal ke pelabuhan Muara baru Jakarta
9	Mei	1	12	3	-	3	-	-	-	3	-
10	Mei	6	71	4	-	4	-	-	-	4	-
11	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Juli	3	26	3	-	3	-	-	-	3	-
13	Juli	2	20	2	-	2	-	-	-	2	-
14	Agustus	2	15,5	2	-	2	-	-	-	2	-
15	Agustus	1	10,5	1	-	1	-	-	-	1	-
16	September	5	46,4	2	-	2	1	-	1	3	Di adhock ke pelabuhan umum Jepara
17	Oktober 1	5	58,5	2	-	2	-	-	-	2	-
18	Oktober 2	5	61,7	4	-	4	-	-	-	4	-
19	Desember	8	113,1	12	-	12	3	-	3	15	2 KII adhock ke pangkalan PSDKP Jakarta (PPS Nizam Zachman), 1 KII adhock ke pelabuhan umum Jepara
Jumlah		90	913,7	104	0	104	14	0	14	118	-

Sumber: Subsie Sarpras Stasiun PSDKP Cilacap

Gambar 4. Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas Hiu Macan 05 dan Hasil pemeriksaa kapal perikanan

Untuk mendukung capaian IKU "Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap (hari)" dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.337.080.000 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan puluh Ribu Rupiah*) sampai dengan 31 Desember telah terealisasi Rp.8.302.361.780(*Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*) dengan persentase sebesar 99,58%.

b. Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Cilacap tahun 2019 telah tercapai 22 Hari Operasi . Kegiatan utama IKU ini merupakan pengawasan kegiatan *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP-NRI Wilayah Barat dengan menggunakan 5 (lima) unit speedboat PSDKP. Sesuai surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: 16644/PSDKP.0.1.1/RC.610/VI/2019 hal Penyesuaian Dokumen Kontrak kinerja, maka untuk IKU Hari Operasi Speed Boat pada seluruh dokumen kontrak kinerja harus mengacu pada lampiran surat dimaksud. Adapun capaian IKU Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap tercantum dalam Tabel 17.

Tabel 17. Jumlah hari operasi *Speedboat* Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019

Nama Speedboat	CAPAIAN 2018	TARGET 2019 (Hari)	REALISASI (Hari)	% CAPAIAN
Napoleon 033 (Stasiun PSDKP Cilacap)	50 Hari Operasi	25 Hari Operasi	25 Hari Operasi	100,00 %
Napoleon 034 (Satwas SDKP Trenggalek)	50 Hari Operasi	25 Hari Operasi	25 Hari Operasi	100,00 %
Dolphin 029 (Satwas SDKP Pekalongan)	50 Hari Operasi	21 Hari Operasi	21 Hari Operasi	100,00 %
Marlin 03 (Stasiun PSDKP Cilacap)	50 Hari Operasi	20 Hari Operasi	20 Hari Operasi	100,00 %
Marlin 09 (Satwas SDKP Pati)	50 Hari Operasi	20 Hari Operasi	20 Hari Operasi	100,00 %
TOTAL	50 Hari Operasi	22 Hari Operasi	22 Hari Operasi	100,00 %

Kegiatan utama yang dilaksanakan Tahun 2019 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat sebagai berikut:

- Speed Boat Napoleon 033 Ukuran (12 Meter) Kelas F , Lokasi Pengawasan Stasiun PSDKP Cilacap WPP 573 (Samudra Hindia) capaian hari operasi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 25 hari operasi dengan hasil pemeriksaan terhadap kapal ikan dilaut sebanyak 36 unit kapal.
- Speed Boat Napoleon 034 Ukuran (12 Meter) Kelas F , Lokasi Pengawasan Satwas SDKP Trenggalek WPP 573 (Samudra Hindia) capaian hari operasi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 25 hari operasi dengan hasil pemeriksaan terhadap kapal ikan dilaut sebanyak 57 unit kapal.
- Speed Boat Marlin 03 Ukuran (6 Meter) Kelas F , Lokasi Pengawasan SatStasiun PSDKP Cilacap WPP 573 (Samudra Hindia) capaian hari operasi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 20 hari operasi dengan hasil pemeriksaan terhadap kapal ikan dilaut sebanyak 21 unit kapal.
- Speed Boat Marlin 09 Ukuran (6 Meter) Kelas F , Lokasi Pengawasan Satwas SDKP Pati WPP 712 (Laut Jawa) capaian hari operasi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 20 hari operasi dengan hasil pemeriksaan terhadap kapal ikan dilaut sebanyak 68 unit kapal.
- Speed Boat Dolphin 029 Ukuran (6 Meter) Kelas F , Lokasi Pengawasan Satwas SDKP Pekalongan WPP 712 (Laut Jawa) capaian hari operasi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 21 hari operasi dengan hasil pemeriksaan terhadap kapal ikan dilaut sebanyak 34 unit kapal.

Periode Tahun 2019 telah terlaksana hari Operasi *Speedboat* Sebanyak 22 hari Operasi sesuai dengan target yang telah di tetapkan pada tahun 2019 yaitu 22 Hari Operasi tercapai 100,00%, Capaian tersebut merupakan rata-rata hari operasi dari 5 (lima) unit *speedboat* yang di miliki oleh Stasiun PSDKP Cilacap. Sementara pada tahun 2018 Capaian hari operasi *speedboat* tercapai sebanyak 50 Hari Operasi dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 50 Hari Operasi atau sebesar 100,00%. Dari perbandingan capaian Hari Operasi antara tahun 2018 dan tahun 2019, maka pada tahun 2019 mengalami penurunan terhadap jumlah hari operasi yang harus dilakukan.

Untuk mendukung capaian IKU “Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Cilacap” dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.003.888.000 (*Satu Milyar Tiga Juta Delapan ratus Delapan puluh Delapan Ribu Rupiah*) sampai dengan 31 Desember telah terealisasi Rp.951.292.229(*Sembilan ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) dengan persentase sebesar 94,76 %.

- c. Jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Stasiun PSDKP Cilacap yang di tangani PPNS Perikanan di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Cilacap pada Tahun 2019 adalah sebanyak 2 Kasus. Sebanyak 2 kasus tersebut merupakan hasil tangkapan patroli dari Kapal Pengawas Hiu Macan 05 terhadap kapal Ikan Indonesia (KII) yang di *Adhock* ke Tegal.

Kasus yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada kurun waktu Tahun 2019 merupakan tindak pidana pelanggaran berupa tidak memenuhi ketentuan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan yang dilakukan oleh tersangka atas nama RUDI HARTONO dan tersangka atas nama MURTADHO yang disangka melanggar Pasal 93 Ayat (1) atau Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Berkas Perkara tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batang dengan di buktikan dengan surat nomor sebagai berikut;

1. Nomor : B-573/ O.3.40/ Euh.1/ 03/ 2019 tanggal 20 Maret 2019.
2. Nomor : B-569/ O.3.40/ Euh.1/ 03/ 2019 tanggal 19 Maret 2019.

Dengan di terbitkannya surat tersebut diatas dan di tetapkannya bahwa berkas dinyatakan lengkap, maka IKU Jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel telah tercapai sebanyak 2 kasus.

- d. Jumlah barang bukti dan awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap tercapai 2 barang bukti dari target 2 barang bukti dengan persentase capaian sebesar 100%. Kegiatan IKU ini merupakan implementasi dari penerapan IKU penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap, dengan target utama IKU ini adalah melaksanakan

pengamanan barang bukti kasus tindak pidana perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya 2 kasus yang di tangani pada tahun 2019, maka IKU tersebut terpenuhi hal ini karena adanya Barang Bukti berupa Kapal dan alat tangkap Ikan dari kasus TPKP yang disidik oleh Stasiun PSDKP Cilacap

- e. Jenis ikan yang dilindungi dan diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2019 tercapai 5 jenis dari target Tahun 2019 yang telah di tetapkan yaitu 3 jenis ikan. Kegiatan utama IKU ini adalah pengawasan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan dikelola berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kegiatan ini tercantum dalam tabel 18 berikut :

Tabel 18. Jenis ikan yang dilindungi dan diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KODE	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2018	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
IKU.7	Jenis Ikan yang Dilindungi yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	4 Jenis Ikan	3 Jenis Ikan	5 Jenis Ikan	120,00 %
	TOTAL	4 Jenis Ikan	3 Jenis Ikan	5 Jenis Ikan	120,00 %

Sampai pada tahun 2019 Stasiun PSDKP Cilacap dilaksanakan dan tercapai 5 Jenis Ikan yang diawasi dari target tahun 2019 yang telah di tetapkan yaitu 3 jenis ikan. Adapun uraian capaian IKU "Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku" sebagai berikut :

- Pengawasan Jenis Ikan di Lindungi "Pari Manta" di wilayah TPI Barat PPN Prigi, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, Prov.Jawa Timur pada tanggal 03 Maret 2019 dengan nomor SPT:0059/ Sta.1-TRK/ PW.224/ III/ 2019.
- Pengawasan Jenis Ikan di Lindungi "Penyu Hijau" di wilayah Konservasi Penyu Pantai Taman Pacitan, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur pada tanggal 3 April 2019 dengan Surat Perintah Tugas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor 0086/Sta.1-TRK/PW.224/IV/2019.
- Pengawasan Jenis Ikan di Lindungi "Benih Lobster" di wilayah Pantai Watukarung, kecamatan Pringkuku, Kab. Pacitan, Prov. Jawa Timur pada

tanggal 5 Juli 2019 dengan nomor SPT 0136/Sta.1-TRK/PW.244/VII/2019.

- Pengawasan Jenis Ikan di Lindungi "Ikan Pari Mobula" di wilayah Pantai Prigi, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada tanggal 9 Juli 2019 dengan nomor Surat Tugas 0141/Sta.1-TRK/PW.244/VII/2019.
- Pengawasan Jenis Ikan di Lindungi "Hiu Lanjaman Jawa (*Charcharhinus brevipinna*)" di wilayah Pantai Prigi, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada tanggal 21 Juli 2019 dengan nomor Surat Tugas 0147/Sta.1-TRK/PW.244/VII/2019.

Periode Tahun 2019 telah dilakukan pengawasan Jenis Ikan Dilindungi Sebanyak 5 jenis ikan melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 3 jenis ikan dengan prosentase 120,00%. Sementara pada tahun 2018 Capaian Jenis Ikan Dilindungi tercapai sebanyak 4 jenis ikan dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 3 jenis ikan. Dari perbandingan capaian jenis ikan yang dilindungi pada tahun 2018 dan tahun 2019, maka pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 1 jenis ikan yang di periksa.

Untuk mendukung capaian IKU "Jenis Ikan yang Dilindungi yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan" dialokasikan anggaran sebesar Rp.60.000.000 (*Enam Puluh Juta Rupiah*) sampai dengan 31 Desember telah terealisasi Rp.52.840.775 (*Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh puluh Lima Rupiah*) dengan persentase sebesar 88,06 %.

4. Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Aparatur Sipil Negara UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang kompeten, Profesional, dan berkepribadian

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengetahui capaian SS-4 adalah " Indeks Profesionalitas ASN Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap" dengan target sebesar 71. Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian **Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin** per masing-masing Pegawai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Nilai capaian Tahun 2019 tercapai sebesar 71 Capaian tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 71 pada tahun 2019. Capaian tersebut diperoleh dari 4 variabel, sebagai berikut:

Tabel 19. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap Tahun 2019

Aspek penilaian	Bobot	Nilai	%
Kualifikasi	25	12,03	48,12
Kompetensi	40	29,28	73,20
Kinerja	30	24,72	82,40
Disiplin	5	4,97	99,40
IP ASN DJPSDKP	120	71,00	71,00

Berdasarkan tabel diatas, nilai yang rendah adalah nilai kualifikasi dengan persentase capaian hanya 48,12% Nilai kualifikasi sendiri diperoleh dari tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP. Nilai terendah berikutnya adalah nilai kompetensi ASN dengan bobot 40, hanya tercapai sebesar 73,20%. Nilai kompetensi diperoleh dari keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon). Nilai tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan kompetensi ASN lingkup Ditjen. PSDKP baik Satker pusat maupun UPT PSDKP.

Capaian tersebut merupakan akumulasi dari capaian seluruh pegawai Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sebanyak 69 pegawai yang bekerja baik di UPT PSDKP Stasiun PSDKP Cilacap maupun yang berada di Satwas SDKP. Rekapitulasi nilai berdasarkan capaian Stasiun PSDKP Cilacap, sebagai berikut:

Tabel 20. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
			Bobot 25	Bobot 40	Bobot 30	Bobot 5	
1	Stasiun PSDKP Cilacap	69	12,03	29,28	24,72	4,97	71,00

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya. Beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian IK ini antara lain:

- Uji Kompetensi Pegawai Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.
- Melakukan *update* data SDMA yang terdapat dalam aplikasi Simpeg meliputi data pendidikan, pelatihan dll.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala tingkat kehadiran pegawai PSDKP melalui *finger print online*.
- Monitoring dan Evaluasi pengisian capaian kinerja Output individu pada Aplikasi E-SKP
- Pembinaan pegawai unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.

5. Sasaran Strategis 5 : Tersedianya manajemen pengetahuan UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang handal dan mudah diakses.

Dalam pencapaian sasaran ini Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi 1 IKU yaitu "Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Cilacap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar". Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi Bitrix24.com dengan target 80 % satu tahun. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Cilacap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2019 tercapai 92,50% melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 80,00%. Bila dibandingkan dengan tahun 2018 IKU tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,94%, karena pada capaiannya diperoleh angka 85,56.

Data dan informasi yang disajikan dalam Bitrix24.com Stasiun PSDKP Cilacap diantaranya berupa : Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, Penyampaian PK, Profil Stasiun PSDKP Cilacap serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Cilacap dan *Update* Data Penerbitan SLO.

Tabel 21. Penerapan Manajemen Pengetahuan Stasiun PSDKP Cilacap menggunakan Aplikasi Bitrix.24

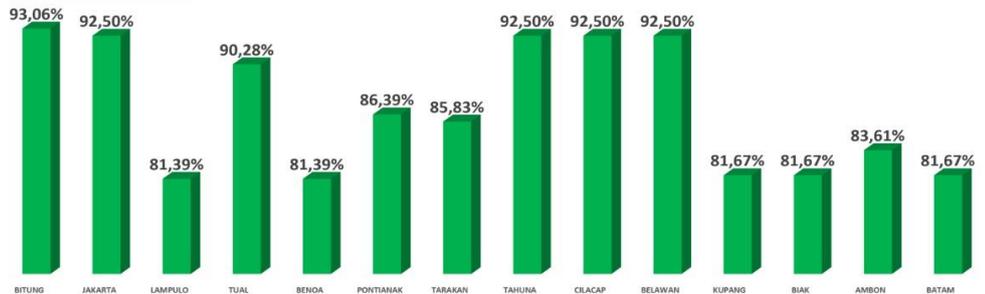
IKU	CAPAIAN 2018	2019		% CAPAIAN
		TARGET	CAPAIAN	
Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal dan Mudah diakses	85,56%	80,00	92,50	115,62%

Capaian tahun 2019, mengalami kenaikan dari capaian tahun 2018. Dengan mencermati capaian tahun 2018, probabilitas pencapaian target pada akhir renstra cukup tinggi. Tingginya pencapaian kinerja tersebut menunjukkan partisipasi para pejabat Eselon V lingkup Stasiun PSDKP Cilacap serta Pejabat Eselon IV yaitu Kepala Stasiun PSDKP Cilacap sangat besar untuk menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan melalui sistem pengetahuan yang telah ditetapkan. Metode perhitungan dengan menggunakan aplikasi bitrix 24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak unit kerja yang menerima informasi-informasi yang disampaikan, dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

CAPAIAN NILAI MP DITJEN PSDKP
TRIWULAN IV TAHUN 2019

TARGET TW IV
80%

UPT PSDKP



Gambar 5. Capaian IKU Presentase Unit Kerja yang menerapkan Sisem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

6. Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya birokrasi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Dalam rangka mewujudkan “Terwujudnya birokrasi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima” Ditjen. PSDKP telah mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance* dalam pengelolaan organisasinya. Untuk mengukur SS ini, telah diidentifikasi 4 (empat) IKU yaitu: ⁽¹⁾Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (%); ⁽²⁾ Nilai Maturitas SPIP Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (nilai); ⁽³⁾Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%); ⁽⁴⁾Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (%). Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SS-6 sebagai berikut:

Tabel 22. Pencapaian keempat IKU yang ada dalam SS-6

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian
Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi lingkup Stasiun PSDKP Cilacap(%)	100	100	100
Level maturitas SPIP Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	Level (3)	Level (3,50)	116,66
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan(%)	100	100	100
Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap(%)	100	100	100

- a. Nilai Kinerja RB lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap, Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Nilai Kinerja RB lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap Tahun 2019 mengadopsi langsung dari Eselon I yaitu Direktorat Jenderal PSDKP yaitu 100%.
- b. Level Maturitas SPIP Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap, pada tahun 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencoba untuk memunculkan satu indikator baru yang tujuannya untuk menilai kualitas dari sistem pengendalian intern dari tiap eselon I yang ada di lingkup KKP, nama indikator tersebut adalah Nilai Maturitas SPIP. Pengukuran nilai maturitas SPIP dapat dijadikan media atau alat evaluasi sekaligus perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian intern yang diadopsi di masing-masing unit kerja. Indikator ini masih dalam tahap penyempurnaan di tingkat Pusat KKP di mana yang bertanggungjawab terhadap indikator ini adalah Inspektorat Jenderal KKP. Penyempurnaan yang dimaksud terkait dengan definisi indikator, cara atau metode pengukuran, serta sumber data yang akan digunakan. Capaian Level Maturitas SPIP Stasiun PSDKP Cilacap periode Tahun 2019 tercapai dengan nilai 3,50 dengan mengadopsi langsung dari Eselon I DJ-PSDKP. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperoleh nilai kinerja tersebut melalui:
- 1) Pengisian kuisioner oleh seluruh satuan kerja Pusat lingkup Ditjen. PSDKP berjumlah 122 responden melalui website spip.bpkp.go.id/maturitasspip.
 - 2) Workshop dalam rangka pengecekan dokumen SPIP bersama dengan BPKP sesuai hasil input dalam website spip.bpkp.go.id/maturitasspip.
 - 3) Melengkapi data dukung yang memadai masing-masing fokus penilaian.
- c. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi

dan disampaikan (%) capaiannya dengan mengadopsi langsung dari Eselon I DJ-PSDKP yaitu 100%.

Inspektorat Jenderal										Nama Orisk		Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan TA 2018 di Stasiun PSDKP Cilacap	
										No. LHP	19.2.6/ITJ.2/HP.550/2019		
										Tgl LHP			
										Lokasi	Cilacap		
HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN ITJEN													
Form TL													
No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Penyelesaian			Keterangan			
	Uraian Ringkasan	Kode	Jumlah	Uraian Ringkasan	Jumlah	Uraian Ringkasan	Jumlah						
1	Kekurangan dokumen pertanggungjawaban keuangan senilai Rp3.793.000,00			Sehubungan dengan permasalahan tersebut disarankan kepada Kepala Stasiun PSDKP Cilacap agar menginstruksikan									
				a. Koordinator Satwas SDKP Trenggalek untuk:									
				1 Melengkapi tanda terima pembayaran dan bukti kehadiran di lokasi pada pertanggungjawaban transport lokal sesuai lampiran I pada PMK 113 Tahun 2012 baik format dokumen maupun penandatanganannya.			1	telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi					Tuntas
				2 Melengkapi pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan SPD tanggal 6 Desember 2018.			2	telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi					Tuntas
				b. Koordinator Satwas SDKP Pekalongan untuk melengkapi bukti kegiatan pengujian lab. dengan hasil uji lab. dan melengkapi pertanggungjawaban konsumsi rapat dengan undangan, daftar hadir yang melibatkan eselon II lainnya, notulensi/laporan dan keterangan waktu minimal rapat 2 jam.				telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi					Tuntas
				c. Koordinator Satwas SDKP Malang untuk melengkapi pertanggungjawaban konsumsi rapat dengan undangan, daftar hadir yang melibatkan eselon II lainnya, notulensi/laporan dan keterangan waktu minimal rapat 2 jam.				telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi					Tuntas
2	Terdapat Ketidaksesuaian Kondisi Lapangan dengan As built drawing pada pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Fungsional (Lomanis)			Sehubungan dengan permasalahan tersebut disarankan kepada Kepala Stasiun PSDKP Cilacap untuk menginstruksikan CV. Piramida Perkasa untuk melakukan perbaikan as built drawing sesuai dengan kondisi lapangan				telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi					Tuntas
3	Terdapat Kekurangan Pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Drainase Satwas SDKP Pati senilai Rp1.739.395,95.			Sehubungan dengan permasalahan tersebut disarankan kepada Kepala Stasiun PSDKP Cilacap untuk menginstruksikan PPK menarik kelebihan pembayaran pada CV Jaya Laksana senilai Rp1.739.395,95, selanjutnya disetor	Rp 1.739.395,95			sudah dilakukan penyetoran senilai Rp1.739.400 dengan nomor NTPN C2B/F329/PEM0K11Q0	Rp1.739.400,00				Tuntas
4	Pencatatan Persediaan Suku Cadang Kapal Pengawas Hiu Macan 05 belum Terlib			Sehubungan dengan permasalahan tersebut disarankan kepada Kepala Stasiun PSDKP Cilacap:									
				a. Menginstruksikan Nahkoda Kapal Pengawas Hiu Macan 05 untuk melengkapi pencatatan penggunaan suku cadang bulan Februari 2019.				telah ditindaklanjuti sesuai					Tuntas
				b. Melakukan penelusuran jumlah suku cadang yang diserahkan-terimakan dari Dit.PCA periode sebelum serah terima KP kepada Stasiun PSDKP Cilacap dan melakukan pencatatan penggunaannya secara terpisah dengan Suku cadang yang berasal dari Stasiun				telah ditindaklanjuti sesuai					Tuntas

Gambar 6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap

d. Pemenuhan Dokumen AKIP Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap.

Pemenuhan Dokumen AKIP Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada Tahun 2019 capaiannya dengan mengadopsi langsung dari Eselon I DJ-PSDKP yaitu 100%.

Pemenuhan Dokumen AKIP Per Triwulan

Dokumen AKIP	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
PERENCANAAN				
Perjanjian Kinerja Level 2 Tahun 2019	V	-	-	-
Perjanjian Kinerja Level 3 Tahun 2019	V	-	-	-
Perjanjian Kinerja level 4 Tahun 2019	V	-	-	-
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2019	V	-	-	-
RKT Tahun 2019	V	-	-	-
PENGUKURAN				
Pengisian Aplikasi Kinerja (SAPK, E-MONEV, SMART)	V	V	V	V
PELAPORAN				
Laporan Kinerja Tahun 2018	V	-	-	-
Data Dukung Laporan Kinerja Tahun 2018	V	-	-	-
Laporan Kinerja Triwulanan 2019	V	V	V	V
Data Dukung Laporan Kinerja Triwulanan 2018	V	V	V	V
Evaluasi Rencana Aksi 2019	V	V	V	V

Gambar 7. Pemenuhan Dokumen AKIP

7. Sasaran Strategis 7 : Terkelolanya anggaran Stasiun PSDKP Cilacap secara efisien dan akuntabel

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggung jawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana dokumen pelaksanaan anggaran berupa DIPA. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Stasiun PSDKP Cilacap mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu ⁽¹⁾Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran Stasiun PSDKP Cilacap; ⁽²⁾ Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap TA.2018 (%).

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SS-7 sebagai berikut:

a. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap meliputi 12 (dua belas) komponen capaian yaitu sebagai berikut: Pengelolaan Uang Persediaan, Data Kontrak, kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian tagihan, Rekon LPJ, renkas, Realisasi, Pagu minus dan Dispensasi SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019 sebesar 93,41% dari target sebesar 87%. Rekapitulasi nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

Tabel 23. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

No	Komponen IKPA	Nilai Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pengelolaan UP	10,00	10,00
2	Data Kontrak	15,00	15,00
3	kesalahan SPM	6,00	5,40
4	Retur SP2D	6,00	6,00
5	Hal III DIPA	5	4,01
6	Revisi DIPA	5	5,00
7	Penyelesaian tagihan	15	15,00
8	Rekon LPJ	5	5,00
9	Renkas	0	0,00
10	Realisasi	20	20,00
11	Pagu minus	4	4,00
12	Dispensasi SPM	4	4,00
	Nilai Total		93,41
	Konversi Bobot		95
	Nilai Akhir (Nilai Total/konversi bobot)		93,86

Sumber: Omspan

b. Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap TA.2018

Setiap Kementerian/Lembaga baik ditingkat pusat maupun daerah, wajib mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya dengan menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Untuk meyakini keakuratan data yang disajikan dalam LK tersebut, maka secara berjenjang wajib melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama, dimana hasil rekonsiliasi ini nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tercapainya target ketaatan Tingkat kepatuhan mencapai 100%. Hal ini didukung oleh konsistensi penerapan berbagai aturan dalam pelaksanaan kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian TA. 2019 terhadap persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Stasiun PSDKP Cilacap TA. 2018 di nilai pada akhir tahun 2019

dengan mengadopsi langsung dari Eselon I DJ-PSDKP dengan nilai 0,01 pada tahun 2019.

C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada Tahun 2019 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.031665/2019 tanggal 05 Desember 2018, mendapat alokasi danapagu awal sebesar **Rp.24.832.496.000,-** (*Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*). Pada tanggal 08 Oktober 2019 dilakukan Revisi DIPA ke-8 yang menjadi Kewenangan DJA sehingga Pagu anggaran Stasiun PSDKP Cilacap menjadi **Rp.24.726.431.000,-** (*Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*). Adapun Realisasi anggaran tahun 2019 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebesar **Rp.24,386,811,244,-** (*Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) dengan persentase **98,63%**. Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap periode Januari – Desember 2019

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)
2350	Peningkatan Operasional Pengoperasian Kapal Pengawas	12.837.112.000	12.662.877.909	98,64	174.234.091
2351	Program Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan	95.024.000	94.962.100	99,93	61.900
2352	Program Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	195.000.000	186.992.175	95,89	8.007.825
2353	Program Peningkatan Operasional Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	719.760.000	705.667.280	98,04	14.092.720
2355	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	10.879.535.000	10.736.311.780	98,68	143.223.220
TOTAL		24.726.431.000	24.386.811.244	98,63	339.619.756

Sumber: Bagian Keuangan Stasiun PSDKP Cilacap

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2019 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun anggaran 2019, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Cilacap berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

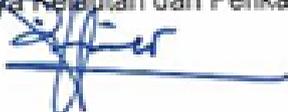
1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja.
2. Komitmen semua pihak untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan SDM pengawasan yang kompeten serta sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap.
4. Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi potensi pengawasan SDKP, dengan meningkatkan peran Satwas, Wilker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.

Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler.
2. Melakukan Perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mendukung pencapaian IKU.
3. Mengusulkan SDM Pengawas mengikuti diklat dan meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.
4. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Satwas lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.

LAMPIRAN

1. Lampiran Perjanjian Kinerja

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON : (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE : (021) 3520346 WEBSITE : www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL : djjenpsdkp@kkp.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 [PERUBAHAN] STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:</p>	
Nama	: Sigit Bintoro
Jabatan	: Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama	: Nilanto Perbowo
Jabatan	: Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
<p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
Jakarta, Desember 2019	
<p>Pihak Kedua Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p>  Nilanto Perbowo	<p>Pihak Pertama Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap</p>  Sigit Bintoro
<i>Bekerja dengan integritas dan teladan</i>	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 [PERUBAHAN]
STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP**



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE			
1.	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	1. Jumlah unit usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan (Unit Usaha)	2. /84
		2. Jumlah pelaku usaha pemantaan WPK yang diperiksa kepatuhannya sesuai ketentuan perundang-undangan (Unit Usaha)	19
INTERNAL PROSES PERSPECTIVE			
2.	Tersedianya infrastruktur pengawasan SDKP dan Sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP	3. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu [Unit] - Bangunan Operator	1
3.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif	4. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap (hari)	90
		5. Jumlah hari operasi speedboat/KIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Cilacap (hari)	22
		6. Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap	2
		7. Jumlah Barang Bukti dan Awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel lingkup UPT Stasiun PSDKP Cilacap	2
		8. Jenis Ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	3
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE			
4.	Terwujudnya ASN UPT Stasiun PSDKP Cilacap	9. Indeks Profesionalitas ASN Stasiun Pengawasan SDKP	

Belanja dengan integritas dan akuntabilitas

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	yang kompeten, profesional dan berkepribadian	Cilacap	71
5.	Tersedianya manajemen pengetahuan UPI Stasiun PSDKP Cilacap yang handal dan mudah diakses	10. Persentase yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar <i>lingkup unit kerja</i> Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (%)	80
6.	Terwujudnya birokrasi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	11. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (%)	100
		12. Level Maturitas SHIP Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (nilai)	Level 3
		13. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	100
		14. Persentase pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (%)	100
7.	Terkelolanya anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap secara efisien dan akuntabel	15. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (nilai)	Baik [87]
		16. Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap TA. 2018 (%)	1
<i>Kelangka dengan integritas dan ketelitian</i>			

Program	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Jumlah Anggaran Tahun 2019	Rp.24.726.431.000,00

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Pemantauan dan Operasi Armada	12.837.112.000
2.	Pengawasan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	95.024.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	195.000.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	719.760.000
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	10.879.535.000
Jumlah Anggaran Tahun 2019		Rp. 24.726.431.000



Pihak Kedua
 Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Nilanto Perbowo

Jakarta, Desember 2019

Kepala Stasiun Pengawasan
 Sumber Daya Kelautan dan
 Perikanan Cilacap

Sigit Bintoro

Lebih banyak integrasi dan inovasi

2. Renstra Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
STAKEHOLDERS/CUSTOMER PERSPECTIVE						
SS	1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan					
1	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	-	-	76	-	-
2	Jumlah Unit Usaha Perikanan yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan	-	-		2.657	2.784
3	Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan WP3K yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	-	-	5	19
INTERNAL PROSES PERSPECTIVE						
SS	2. Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP					
4	Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu <i>a. Rehabilitasi bangunan fungsional</i>	-	-	1	1	1
SS	3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif					
5	Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU Fishing</i> dan kegiatan yang merusak SDKP					

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	di WPP-NRI <i>a. Kapal Pengawas (hari)</i> <i>b. Speedboat Pengawas (hari)</i>	-	-	a.130 b.50	a.150 b.50	a. 90 b.22
6	Jumlah kapal pengawas yang siap beroperasi <i>a. Kapal Pengawas (unit)</i> <i>b. Speedboat Pengawas (unit)</i>	-	-	a.1 b.5	a.1 b.5	
7	Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan (%)	-	-	87	90	2
8	Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU Fishing</i> dan kegiatan yang merusak sumberdaya kealutan dan perikanan (%)	-	-	0,46	2,23	-
9	Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (jenis ikan)	-	-	1	3	3
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE						
SS	4. Tersedianya Aparatur Sipil Negara Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang kompeten, professional dan berintegritas					
10	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Stasiun PSDKP Cilacap	-	-	80	81	71
SS	5. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses					

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
11	Persentase unit kerja Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang menerapkan system manajemenpengetahuan yang terstandar (%)	-	-	65	66	80
SS	6. Terwujudnya birokrasi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima					
12	Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (%)	-	-	100	100	100
13	Nilai Maturitas SPIP Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (nilai)	-	-	Level 2	Level 3	Level 3
14	Persentase jumlah rekomendasi hasilpengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	-	-	-	-	100
SS	Persentase pemenuhan dokumen AKIP Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (%)	-	-	100	100	100
15	7.Terkelolanya anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap secara efisien dan akuntabel					
16	Nilai kinerja anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap (nilai)	-	-	Baik [85]	Baik [86]	Baik [87]
17	Batas tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap TA. 2017 (%)	-	-	-	1	1
18	Persentase kepatuhan terhadap Standar			100	-	-

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Akuntansi Pemerintah (SAP) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)					



Jalan Bima No. 104 A Kebonmanis
Kecamatan Cilacap Utara - Cilacap 53235 Jawa Tengah
Telepon (0282) 5565152 Fax (0282) 5565152
Email: psdkp.cilacap@kkp.go.id Email2: satker_psdkpclp@yahoo.co.id